

Faktor Ekonomi yang Mempengaruhi Demokrasi dan Demokratisasi

Oleh: Budi Kurniawan
Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan,
Univesitas Lampung

1. Pendahuluan

Apa dampak faktor-faktor ekonomi seperti sumber daya alam, bantuan luar negeri, dan ketidaksetaraan terhadap demokrasi? Mengapa beberapa negara kaya terus menjadi otoriter? Makalah ini menantang teori modernisasi, yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan dapat memfasilitasi demokrasi dan demokratisasi. Saya berpendapat bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat memfasilitasi demokrasi dan demokratisasi. Namun, kemajuan dalam pembangunan ekonomi akan bertahan bagi suatu negara untuk tetap demokratis daripada memfasilitasi demokratisasi dari otoriter. Sumber daya alam dan bantuan asing menghambat demokrasi karena otonomi negara dari masyarakat.

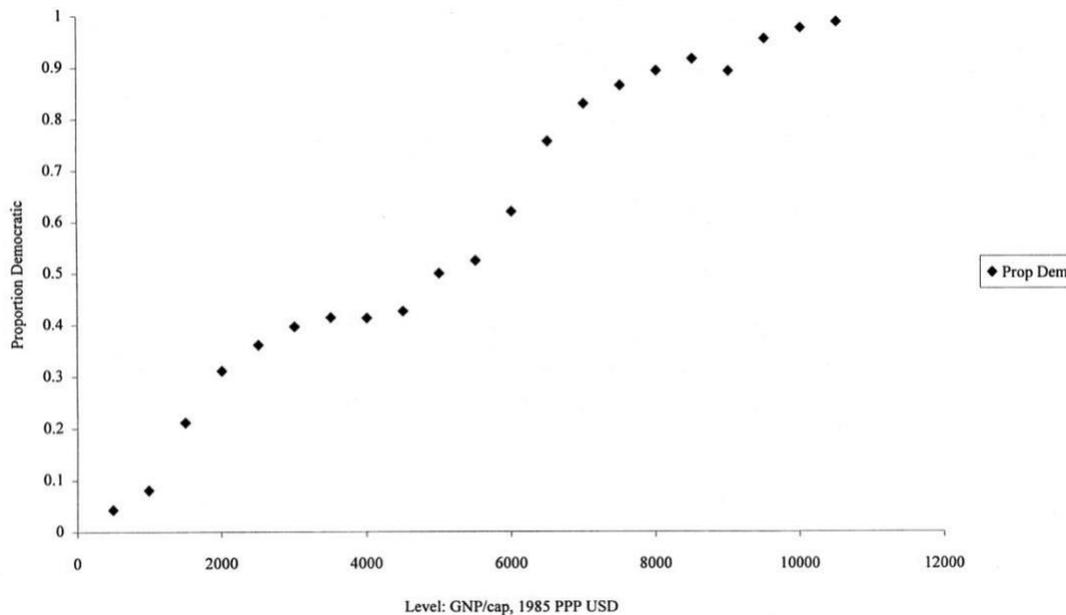
Makalah ini dibagi menjadi beberapa bagian berikut ini. Pertama, saya mengevaluasi teori modernisasi. Pada bagian ini, saya memberikan beberapa penjelasan mengapa beberapa negara berpenghasilan tinggi tetap otoriter, dan mengapa bantuan asing menghambat demokrasi. Pada bagian kedua, saya menganalisis kelangsungan hidup demokrasi untuk mendukung argumen saya mengapa pembangunan ekonomi/kesejahteraan dapat mempertahankan demokrasi. Pada bagian ketiga, saya menganalisis isu ketimpangan dan demokrasi. Pada bagian ini saya berargumen bahwa ketidaksetaraan menghambat demokrasi jika jenis ketidaksetaraan yang dimaksud adalah kepemilikan tanah, bukan ketidaksetaraan pendapatan.

2. Teori Modernisasi dan Demokrasi: Asumsi-asumsi dasar

Menurut teori modernisasi klasik, negara-negara lebih mungkin menjadi dan tetap demokratis ketika mereka maju secara ekonomi, semua peradaban berkembang melalui tahap-tahap historis yang sama dari pertumbuhan ekonomi seperti apa yang terjadi di negara-negara barat. Setelah dekolonisasi pasca-Perang Dunia II, asumsi dibuat bahwa negara-negara bangsa miskin baru saat ini hanya berada pada titik awal dalam proses perkembangan historis linier ini seperti apa yang dialami oleh negara-negara maju. Rostow (1960) Rostow berpendapat bahwa pada tahun 1950-an dan 1960-an, negara-negara di Afrika, Asia, dan Amerika Latin hanyalah salinan "tradisional" dari negara-negara Eropa dan bahwa mereka akan segera "berkembang" dan terlihat seperti Eropa Barat dan Amerika Serikat. Sektor pertanian yang besar dan industri kecil serta sektor jasa menjadi ciri khas negara-negara tradisional ini. Negara-negara ini pada akhirnya akan "modern" jika kita menemukan sektor pertanian yang sederhana, sektor industri dan jasa yang signifikan, urbanisasi yang lebih besar, pencapaian pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan masalah sosial. Berdasarkan asumsi ini, para ilmuwan politik menggunakan paradigma yang sama dengan memanfaatkan teori modernisasi ini untuk memahami teori pembangunan politik. Lipset (1959), misalnya, berpendapat bahwa, ketika masyarakat berubah dari "tradisional" menjadi "modern," masyarakat harus mengadopsi bentuk pemerintahan yang lebih tepat. Kediktatoran mungkin dapat bertahan lama dalam masyarakat tradisional, tetapi tidak dalam masyarakat modern, ketika mereka mengalami kemajuan dalam pembangunan ekonomi.

Beberapa studi yang menggunakan data agregat dari sampel yang besar juga menunjukkan bahwa teori modernisasi berhasil. Misalnya, Miller (2016) mengidentifikasi hubungan yang sangat signifikan antara pergeseran demokrasi suatu negara dan korelasi terkini antara pertumbuhan ekonomi dan demokrasi di seluruh dunia dengan melihat 172 negara dari tahun 1820 hingga 2010.

Semakin maju pertumbuhan ekonomi berarti semakin banyak peluang untuk berpindah dari otoriter ke demokrasi. Data ini menggarisbawahi teori modernisasi demokrasi. Selain Miller, Przeworski et al. (2000, p.80) menunjukkan model regresi antara pendapatan per-kapita dan probabilitas sebuah rezim akan menjadi demokratis. Gambar 1 menunjukkan model ini:



Gambar 1: GNP/kap dan Demokratisasi, Sumber: Przeworski dkk. (2000, hlm. 80)

Kurangnya pendekatan behavioralis yang menggunakan statistik untuk inferensi kausal adalah bahwa penelitian ini hanya menangkap hubungan sebab akibat dari sampel besar dataset tanpa membahas "pertanyaan mengapa". "Mengapa?" adalah pertanyaan sentral sains. Pertanyaan "Mengapa" kemudian menjadi celah penting dalam ilmu politik yang dipenuhi oleh pilihan rasional dan institusionalisme baru. (Shepsle, 1997, hal.5) . Dengan kata lain, kita perlu menjelaskan mekanisme kausal antara variabel pembangunan ekonomi dan demokrasi. Ini adalah alasan, kemudian, mengapa institusionalisme baru penting. Dalam konteks teori modernisasi,

kaitan antara demokrasi dan kinerja ekonomi hanyalah data agregat. Dengan menggunakan data agregat, kita dapat berargumen bahwa, secara umum, kinerja ekonomi dapat memfasilitasi demokratisasi. Bagian selanjutnya akan menjelaskan mengapa korelasi positif antara kinerja ekonomi dan demokrasi sebagai asumsi teori modernisasi tidak bekerja di beberapa negara dan wilayah.

2.1 Beberapa keterbatasan

Namun demikian, kita menemukan beberapa keterbatasan dalam asumsi teori modernisasi. Terry Karl (1990) menemukan beberapa anomali dalam kasus Amerika Selatan. Semua asumsi teori modernisasi tentang prakondisi ditantang oleh pengalaman negara-negara Amerika Latin pada tahun 1980-an. Hubungan hipotetis antara kekayaan dan demokrasi dapat digunakan untuk "menjelaskan" transisi menuju demokrasi di Brasil setelah ledakan ekonomi yang berlarut-larut, tetapi hampir tidak dapat menjelaskan transisi Peru, yang ditandai dengan tingkat pertumbuhan yang stagnan, utang luar negeri yang ekstrem, masalah neraca pembayaran yang terus-menerus, dan distribusi pendapatan yang regresif. Hal ini juga tidak dapat menjelaskan anomali Argentina, di mana tingkat PDB per kapita yang relatif tinggi secara terus-menerus disertai dengan pemerintahan otoriter (Karl, 1990).

Selain itu, mengapa beberapa negara Arab Islam yang kaya terus menjadi otoriter? Negara-negara Arab kebanyakan kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam dan institusi politik saling terkait satu sama lain. Dengan demikian, institusionalisme pilihan rasional dapat menjelaskan keterbatasan teori modernisasi. Untuk menghubungkan kekayaan sumber daya alam dan institusi dapat ditelusuri ke sistem perpajakan. Dibandingkan dengan negara maju, negara berkembang dengan sumber daya alam yang kaya mengumpulkan bagian yang lebih rendah dari pendapatan

pajak. Kurangnya perpajakan oleh pendapatan sumber daya memiliki dampak yang signifikan pada bagaimana negara dan masyarakat ini berinteraksi (Ross, 2012, Bab 2). Masyarakat dengan pajak yang rendah karena pendapatan sumber daya alam cenderung kurang menuntut partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah karena mereka tidak kehilangan insentif akibat pajak yang kurang. Akibatnya, masyarakat memiliki sedikit motivasi untuk mengupayakan partisipasi publik dan pembuatan kebijakan yang inklusif. Di sisi lain, para elite dapat meningkatkan legitimasi mereka sendiri, serta legitimasi lembaga-lembaga politik kontemporer, dengan memberikan barang-barang publik yang unggul, kesejahteraan, dan subsidi lainnya kepada warganya.

Pendapatan dari sumber daya alam dapat memfasilitasi para pemimpin otoriter dalam menantang tekanan untuk melakukan demokratisasi. Hal ini juga menguntungkan mereka untuk mengkonsolidasikan cengkeraman mereka pada kekuasaan politik. Para pemimpin yang didanai minyak, seperti yang terjadi di negara-negara Arab, dapat memuaskan kelompok oposisi dengan menawarkan hadiah-hadiah baru, mengurangi pajak, atau keduanya. Ross (2011, hlm. 3-4) menemukan bahwa dalam kasus Musim Semi Arab, pada puncak protes Musim Semi Arab, Arab Saudi menghabiskan miliaran dolar untuk menaikkan upah sektor publik, tunjangan pengangguran, dan subsidi perumahan. Strategi ini berhasil menjaga Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah kaya minyak lainnya tetap otoriter selama protes Arab Spring.

Selanjutnya, kita dapat menantang klaim yang dibuat oleh para budayawan yang berpendapat bahwa budaya adalah masalah bagi demokrasi dan demokratisasi. Kasus negara-negara Arab yang menderita kutukan minyak menunjukkan bahwa budaya (Islam dan Arab) bukanlah elemen

penentu demokratisasi, melainkan kutukan minyak. Dalam konteks Musim Semi Arab, para penguasa yang didukung minyak telah lama menggunakan petrodolar mereka untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan menghalangi reformasi demokratis. Terlepas dari kenyataan bahwa para pengunjuk rasa turun ke jalan di hampir setiap negara Arab, mereka merasa jauh lebih mudah untuk menggulingkan penguasa di negara-negara yang miskin minyak seperti Tunisia dan Mesir daripada di negara-negara kaya minyak seperti Libya, Bahrain, Aljazair, dan Arab Saudi (Ross, 2012, hlm.143). Akibatnya, dalam hal ini, kaitan antara demokratisasi dan Islam sebagai agama menjadi problematis. Proses demokrasi, atau demokratisasi, lebih mementingkan masalah sumber daya minyak daripada Islam sebagai budaya. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan institusionalisme historis, kita dapat menjelaskan mengapa beberapa negara Islam demokratis dan yang lainnya tidak. Dari perspektif institusi historis, sebagian besar negara Muslim adalah pasca-kolonial. Sebagai negara-bangsa baru setelah Perang Dunia II, tipe rezim (institusi politik) negara-negara Muslim saat ini, baik demokrasi atau bukan demokrasi, adalah warisan Kolonial Barat. Sebuah studi oleh Acemoglu dan Robinson (2012, hlm. 245-250) berargumen bahwa kehadiran institusi politik ekstraktif saat ini (otoriter) terkait dengan warisan kolonialisme. Mereka menggunakan Indonesia sebagai contoh negara Islam yang lembaga ekstraktif yang ada terkait dengan gaya pemerintahan kolonial Belanda. Budayawan seperti Max Weber juga berpendapat bahwa etika protestan lebih tepat untuk modernisasi daripada etika katolik. (Kalberg et al., 2013). Namun, dalam konteks Amerika Selatan, demokratisasi diprakarsai oleh gerakan teologi Katolik yang dikenal sebagai teologi pembebasan seperti yang dikatakan Terry (1990) sebagai anomali teori modernisasi di Amerika Selatan.

Ada beberapa negara dengan sumber daya alam yang melimpah yang dapat digunakan untuk memperkuat demokrasi mereka. Bagaimana kita menjelaskan bahwa negara-negara Skandinavia memiliki sumber daya alam dan institusi demokrasi? Sekali lagi, dengan menggunakan pendekatan institusionalisme historis kita dapat menemukan asal-usul institusi di wilayah ini, kita dapat menemukan penjelasan terbaik mengapa institusi negara-negara Skandinavia berbeda dengan negara-negara Arab dalam konteks ini. Negara-negara Skandinavia memiliki sejarah panjang institusi demokrasi. Setelah negara-negara ini membentuk institusi inklusif, boom minyak tiba. Akibatnya, sumber daya minyak bukanlah kutukan bagi mereka, melainkan berkah. Jika kita menggunakan kerangka institusi pajak yang sama dengan yang dikemukakan oleh Ross (2012), maka sistem/lembaga pajak dengan institusi pajak yang lebih tinggi sudah terbentuk sejak lama sebelum ditemukannya sumber daya minyak dalam konteks Skandinavia. Sebaliknya, di negara-negara teluk, institusi pajak ini belum terbentuk terlebih dahulu sebelum eksplorasi minyak.

Isu kedua dari keterbatasan teori modernisasi adalah bantuan asing. Ekonom awal berpendapat bahwa bantuan asing diperlukan untuk menangani masalah kesenjangan keuangan. Pertumbuhan didorong oleh investasi modal, menurut model Harrod-Domar dari ekonomi Keynesian klasik. Jeffrey Sachs percaya bahwa jika negara-negara berkembang dipercepat pertumbuhannya, akhir dari kemiskinan akan terjadi. Dia percaya bahwa hal ini harus datang dalam bentuk bantuan luar negeri yang signifikan dari negara-negara industri (teori big-push). (Sachs, 2005). Setelah mereka memiliki perkembangan ekonomi dengan dorongan besar dari bantuan asing, demokrasi kemudian akan datang.

Namun, alih-alih memperkuat demokratisasi, bantuan asing justru menghambat demokrasi. Dengan menggunakan logika yang sama dengan mengadopsi institusionalisme pilihan rasional dari kutukan sumber daya, bantuan asing memperkuat otonomi pemerintah penerima bantuan dari tuntutan warga negara dengan menghilangkan kebutuhan untuk menaikkan pajak. Bantuan luar negeri memberikan akses kepada pemerintah diktator untuk mendapatkan "uang mudah" yang dapat digunakan secara strategis untuk memberi penghargaan kepada para pendukungnya dan untuk menindas organisasi oposisi. Akibatnya, pajak yang rendah dan pengeluaran yang lebih tinggi yang dimungkinkan oleh bantuan luar negeri melemahkan tuntutan warga negara untuk reformasi demokratis. Studi tentang Ahmed (2012) dari dataset 97 negara selama periode 1975-2004, misalnya, menunjukkan bahwa alih-alih mempromosikan pembangunan sosio-ekonomi dan liberalisasi politik, pemerintah dalam pemerintahan yang lebih otoriter dapat secara strategis mengalihkan kekayaan pemerintah dan rumah tangga yang tidak diperoleh dalam bentuk bantuan asing dan pengiriman uang untuk membiayai patronase, sehingga memperpanjang masa jabatan politik mereka. Singkatnya, alih-alih memfasilitasi pembangunan ekonomi, bantuan asing justru memfasilitasi keberlanjutan otoriter.

Selain itu, bantuan luar negeri juga meningkatkan ketergantungan pemerintah terhadap sumber bantuan luar negeri. Negara donor akan dapat menggunakan pengaruhnya terhadap negara penerima yang bergantung ini. Tetapi apa yang ingin dicapai oleh negara donor dengan memberikan bantuan? Negara donor sering kali menekankan pada pencapaian tujuan strategis seperti tata kelola pemerintahan yang baik, demokrasi, dan persyaratan reformasi dengan bantuan luar negeri mereka di negara penerima bantuan. (Bearce & Tirone, 2010). Ini adalah jenis bantuan luar negeri yang ideal yang, dalam beberapa kasus, berhasil, seperti apa yang dilakukan IMF

setelah krisis keuangan pada tahun 1998 di beberapa negara Asia. Pemerintah donor, misalnya, dapat menggunakan bantuan luar negeri untuk mendorong negara-negara penerima. Namun, jenis bantuan luar negeri yang ideal ini, menurut Svensson, jarang terjadi. (2003) jarang terjadi.

Sebagian besar bantuan asing, termasuk bantuan Cina, tidak bersyarat. Akibatnya, hal itu memperkuat dominasi Cina dan menopang rezim otoriter seperti yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Halper (2010) pada paragraf sebelumnya telah dijelaskan. Bagi negara donor seperti AS, lebih mudah untuk bersekutu dengan rezim diktator untuk menyeimbangkan kekuatan dalam konteks Perang Dingin. Bagi AS, memberikan bantuan kepada rezim otoriter bukan tentang membuat mereka demokratis atau tidak; ini adalah tentang menghilangkan musuh-musuh AS secara strategis di wilayah tertentu. Seperti yang telah diidentifikasi oleh Terry Karl (1990) dalam kasus Amerika Selatan, pemerintah AS memberikan bantuan keuangan kepada rezim militer di beberapa negara di wilayah ini untuk menggantikan pemimpin sayap kiri. Dalam kasus Timur Tengah baru-baru ini, misalnya, sulit untuk membayangkan AS menarik sejumlah besar bantuan dari negara-negara seperti Irak jika mereka tidak melakukan demokratisasi. Ini karena pemerintah negara-negara ini secara strategis sangat penting bagi AS dalam hal memerangi terorisme internasional dan membangun stabilitas Timur Tengah. Kasus Afghanistan baru-baru ini menunjukkan bahwa ketika AS menarik bantuannya, Taliban kembali menguasai negara itu.

Efektif tidaknya bantuan luar negeri dalam mempromosikan demokrasi ditentukan oleh kepentingan strategis negara-negara donor. Ketika kita mempertimbangkan titik kritis berakhirnya perang dingin, sebagian besar bantuan asing efektif, seperti yang terlihat dalam krisis keuangan Asia. Setelah Perang Dingin, AS tidak memiliki ancaman komunis lagi. Akibatnya, tidak

diperlukan sekutu strategis untuk menyeimbangkan kekuatan. Hanya ketika negara donor tidak memiliki kepentingan strategis di negara penerima yang "tergantung", maka bantuan asing akan sangat membantu dalam mendorong reformasi demokratis. Menurut Wright (2009), bantuan luar negeri lebih erat kaitannya dengan reformasi demokratis pada periode pasca-Perang Dingin daripada selama periode Perang Dingin, ketika politik aliansi lebih penting secara strategis (Wright 2009).

Namun, sejak meningkatnya kekuatan Cina setelah perang dingin, banyak negara otoriter lebih suka mendapatkan bantuan luar negeri tanpa syarat dari Cina. Cina kemudian dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri mereka. Sebagai contoh, ASEAN gagal mencapai kesepakatan tentang sengketa maritim Laut Cina Selatan setelah Kamboja melarang penyebutan putusan pengadilan internasional terhadap Beijing dalam pernyataan mereka. Kamboja, sekutu terdekat Cina di ASEAN, mendukung penentangan Beijing terhadap posisi ASEAN di Laut Cina Selatan. Lebih jauh lagi, Miller (2016) Miller berpendapat bahwa keberhasilan ekonomi Cina, Singapura, dan Rusia tampaknya memiliki potensi untuk menginspirasi kebangkitan otoriter. Bantuan Cina telah menanggung rezim-rezim otoriter di seluruh dunia. (Halper, 2010). Dalam kasus Kamboja, misalnya, daya tahan otoriter difasilitasi oleh hadiah naga (bantuan China) dari China. Keajaiban ekonomi China dibantah oleh negara-negara tetangganya, seperti Kamboja. China memberikan bantuan kepada pemerintah otoriter untuk membangun barang publik, seperti infrastruktur. Akibatnya, Kamboja juga mengalami perkembangan ekonomi. Oleh karena itu, bagi orang Kamboja, China adalah negara yang menginspirasi, model negara dengan keberhasilan dalam ekonomi, tetapi rezim otoriter yang kuat. Dengan pembangunan ekonomi yang didukung oleh bantuan China, legitimasi rezim otoriter Kamboja lebih kuat di antara warga Kamboja. Dengan

demikian, hal itu menopang rezim otoriter di Kamboja. Moyo (2009) juga menemukan kesimpulan yang sama dalam konteks Afrika, bantuan asing membantu para tiran tetap berkuasa melalui korupsi dan eksploitasi daripada melalui pengembangan kebijakan publik yang baik. (Moyo, 2009).

Ringkasnya, kutukan sumber daya politik dan kutukan bantuan luar negeri lebih menyangkut penciptaan demokrasi daripada kelangsungan hidupnya. Namun, untuk kelangsungan hidup demokrasi, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan sangat penting bagi keberlangsungan demokrasi. Bagian berikutnya akan membahas secara lebih rinci mengapa pembangunan ekonomi dapat memfasilitasi kelangsungan hidup demokrasi.

3. Pembangunan Ekonomi dan Kelangsungan Hidup Demokrasi

Saya berargumen bahwa kemajuan dalam pembangunan ekonomi akan bertahan bagi suatu negara untuk tetap demokratis daripada memfasilitasi demokratisasi dari otoriter. Bagian ini akan menjelaskan teori bertahan hidup demokrasi untuk mendukung argumen saya mengapa pembangunan ekonomi/kesejahteraan dapat mempertahankan demokrasi.

Menurut Bunce (Halper, 2010) ada dua jenis generalisasi dalam studi demokrasi dan demokratisasi. Salah satu generalisasi mencakup peran pembangunan ekonomi tingkat tinggi dalam memastikan keberlanjutan demokrasi (teori survival). Menurut hipotesis survival, peningkatan pendapatan membantu demokrasi bertahan hidup tetapi tidak berpengaruh pada apakah suatu negara menjadi demokratis (Przeworski et al., 2000). Rezim otoriter dapat berdemokrasi karena berbagai alasan,

tetapi begitu demokrasi didirikan di negara kaya, sangat jarang untuk kembali ke rezim otoriter (Przeworski et al., 2000). Lebih jauh lagi, sebagian besar ekonom percaya bahwa hubungan ini menunjukkan hubungan sebab akibat terbalik: Institusi yang lebih baik yakni demokrasi lah yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi daripada pembangunan ekonomi yang menciptakan demokrasi/institusi politik yang inklusif (Acemoglu & Robinson, 2012; Rodrik et al., 2002).

Dengan menggunakan teori institusi pilihan rasional, kita dapat menjelaskan mekanisme kausal antara pembangunan ekonomi dan kelangsungan hidup demokrasi. Di negara demokratis di mana kesejahteraan lebih tinggi, masyarakat tidak memiliki insentif untuk mengubah kondisi politik. Mereka puas dengan kondisi kelembagaan ekonomi dan politik yang ada. Akibatnya, mengubah institusi politik menjadi otoriter akan membahayakan kondisi kesejahteraan mereka. Hal ini bisa terjadi karena dalam sistem otoriter, kekuasaan hanya berputar di sekitar elit dan untuk menjadi sejahtera dibutuhkan kedekatan dengan elit politik. Warga negara dalam kediktatoran kemungkinan besar akan memiliki kesejahteraan yang luar biasa jika mereka menjadi bagian dari lingkaran dalam diktator dan sangat buruk jika mereka tidak menjadi bagian dari lingkaran dalam diktator. Bagi masyarakat yang menggunakan pemikiran rasional, jika mereka mengubah sistem politik mereka menjadi otoriter, akan ada sedikit peluang bahwa mereka akan berada di lingkaran dalam diktator dan akan menjadi lebih kaya. Sebaliknya, sumber daya tersebar relatif luas di negara-negara demokrasi. Mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses kesejahteraan. Oleh karena itu, mengubah rezim menjadi otoriter terlalu berisiko bagi kesejahteraan mereka.

4. Ketidaksetaraan dan Demokrasi

Isu penting lainnya dalam topik determinan ekonomi dan demokrasi adalah ketimpangan. Beberapa cendekiawan percaya bahwa ketimpangan buruk bagi demokrasi. (Acemoglu & Robinson, 2000, 2001, 2006; Boix, 2003). De Tocqueville berpendapat bahwa meningkatnya kesetaraan ekonomi, khususnya kesetaraan kepemilikan tanah, merupakan kondisi penting bagi eksperimen demokrasi pertama Prancis dan pengalaman demokrasi Amerika. (dikutip dalam Freeman & Quinn, 2012, hlm.59). Demokrasi bagi orang kaya adalah biaya mahal karena mereka harus mendistribusikan kembali kekayaan mereka kepada orang miskin. Ini berarti mereka akan kehilangan insentif. Di sisi lain, bagi orang miskin yang mayoritas, pemilu atau demokrasi lebih murah. Mereka hanya menggunakan suara mereka untuk kesetaraan. Akibatnya, elit ekonomi (oligarki) diperkirakan akan melakukan intervensi untuk menghambat upaya demokratisasi atau melakukan kudeta untuk membalikkan demokratisasi di negara-negara yang sangat timpang.

Namun, beberapa studi menantang teori bahwa ketimpangan buruk bagi demokrasi. Misalnya, Przeworski dkk. (2000, hlm.121-122) berpendapat bahwa "tidak ada bukti bahwa tekanan egaliter mengancam kelangsungan hidup demokrasi". Mereka menemukan bahwa demokrasi kurang stabil di negara-negara yang lebih timpang, di negara-negara di mana ketimpangan pendapatan rumah tangga meningkat, dan dalam masyarakat di mana tenaga kerja memperoleh persentase nilai tambah yang berkurang dalam manufaktur. Sebaliknya, kediktatoran jauh lebih rentan ketika distribusi fungsional pendapatan lebih timpang, terutama di negara-negara miskin.

Ketimpangan menghambat demokrasi tergantung pada jenis ketimpangan apa. Dalam kasus Indonesia, misalnya, meningkatnya ketimpangan pendapatan karena munculnya kelas menengah. Ketimpangan pendapatan memfasilitasi demokratisasi karena kelas menengah dapat dengan

mudah memindahkan modal finansial mereka ke negara lain. Di sisi lain, ketimpangan tanah paralel dengan banyaknya jumlah aristokrat. Bagi kaum aristokrat, demokratisasi merupakan ancaman karena mereka tidak dapat dengan mudah memindahkan aset tanah mereka ke negara lain. Studi tentang Pepinsky (2009) adalah bukti kuat dari penjelasan ini. Keruntuhan ekonomi Indonesia di bawah era Suharto setelah oligarki Cina Suharto, yang tidak memiliki aset tanah yang besar karena diskriminasi etnis, tetapi memiliki modal keuangan yang kuat, memindahkan aset keuangan mereka dengan mudah ke negara lain. Akibatnya, ekonomi runtuh, dan terjadi pergantian rezim segera setelah itu. Studi ini juga paralel dengan studi Freeman & Quinn (2012). Mereka berargumen bahwa rezim diktator timpang yang lebih terintegrasi secara finansial dengan pasar global lebih mungkin mengalami perubahan rezim menjadi demokrasi daripada rezim timpang yang tertutup terhadap ekonomi global.

5. Kesimpulan

Mengapa beberapa negara mencapai demokrasi, sementara yang lain tidak? Mengapa demokrasi berkembang pesat di lokasi-lokasi tertentu sementara gagal di lokasi lain? Kemajuan ekonomi, menurut saya, tidak dapat meningkatkan demokrasi dan demokratisasi. Namun, kemajuan dalam kesejahteraan lebih mungkin mempertahankan status demokratis suatu negara daripada mendorong demokratisasi otoriter. Orang-orang dalam masyarakat demokratis dengan kesejahteraan yang lebih besar memiliki sedikit alasan untuk mengubah situasi politik. Akibatnya, demokrasi akan bertahan dalam masyarakat berpenghasilan lebih tinggi.

Ada beberapa faktor mengapa negara berpenghasilan tinggi tidak dapat beralih ke demokrasi. Pertama, masalah kutukan sumber daya alam menciptakan pemerintah yang otonom dari

rakyatnya. Akibatnya, sulit bagi demokrasi untuk muncul. Kedua, bantuan keuangan asing, juga mengikuti logika yang sama tentang otonomi pemerintah karena kaya akan sumber daya alam. Kita dapat mengidentifikasi jawaban terbaik mengapa negara-negara Skandinavia berbeda dalam konteks kaya sumber daya alam tetapi progresif dalam demokrasi. Negara-negara Nordik memiliki tradisi panjang institusi demokrasi sebelum minyak ditemukan. Institusi demokrasi datang lebih dulu sebelum booming minyak. Lebih jauh lagi, ketidaksetaraan menghambat demokrasi dalam hal kepemilikan tanah daripada ketidaksetaraan pendapatan.

Referensi

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2000). Mengapa Barat memperluas waralaba? Demokrasi, ketidaksetaraan, dan pertumbuhan dalam perspektif sejarah. *The Quarterly Journal of Economics*, 115(4), 1167-1199.

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2001). Sebuah teori transisi politik. *American Economic Review*, 91(4), 938-963.

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2006). *Asal Ekonomi Kediktatoran dan Demokrasi*. Cambridge University Press Cambridge University Press.

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Mengapa Bangsa-Bangsa Gagal: Asal-usul Kekuasaan, Kemakmuran dan Kemiskinan*. Crown Business.
<https://doi.org/10.1080/17550912.2012.718670>

Ahmed, F. Z. (2012). Bahaya Pendapatan Asing yang Tidak Diperoleh: Bantuan, Remitansi, dan Kelangsungan Hidup Pemerintah. *American Political Science Review*, 106(1), 146-165.
<https://doi.org/10.1017/S0003055411000475>

- Bearce, D. H., & Tirone, D. C. (2010). Efektivitas bantuan luar negeri dan tujuan strategis pemerintah donor. *Jurnal Politik*, 72(3), 837-851.
- Boix, C. (2003). *Demokrasi dan redistribusi*. Cambridge University Press.
- Bunce, V. (2000). Demokratisasi komparatif: Generalisasi yang besar dan terbatas. *Studi Perbandingan Politik*, 33(6-7), 703-734.
- Freeman, J. R., & Quinn, D. P. (2012). Asal-usul Ekonomi Demokrasi Dipertimbangkan Kembali. *American Political Science Review*, 106(1), 58-80.
<https://doi.org/10.1017/S0003055411000505>
- Halper, S. (2010). *Konsensus Beijing: Bagaimana model otoriter Tiongkok akan mendominasi abad kedua puluh satu* (Vol. 16). ReadHowYouWant. com.
- Kalberg, S., Kalberg, S., & Weber, M. (Eds.). (2013). *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315063645>
- Karl, T. L. (1990). Dilema demokratisasi di Amerika Latin. *Perbandingan Politik*, 23(1), 1-21.
- Lipset, S. M. (1959). Beberapa syarat sosial demokrasi: Pembangunan ekonomi dan legitimasi politik1. *Tinjauan Ilmu Politik Amerika*, 53(1), 69-105.
- Miller, M. K. (2016). Demokrasi dengan contoh? Mengapa demokrasi menyebar ketika demokrasi dunia makmur. *Perbandingan Politik*, 49(1), 83-116.
- Moyo, D. (2009). *Bantuan Mati: Mengapa Bantuan Tidak Berhasil dan Bagaimana Ada Cara yang Lebih Baik untuk Afrika*. Macmillan.
- Pepinsky, T. B. (2009). Krisis ekonomi dan runtuhnya rezim otoriter. Dalam *Indonesia dan Malaysia dalam perspektif komparatif*.

- Przeworski, A., Alvarez, R. M., Alvarez, M. E., Cheibub, J. A., Limongi, F., & Neto, F. P. L. (2000). *Demokrasi dan pembangunan: Lembaga-lembaga politik dan kesejahteraan di dunia, 1950-1990* (Edisi 3). Cambridge University Press.
- Rodrik, D., Subramanian, A., & Trebbi, F. (2002). *Aturan Institusi: Keutamaan Institusi atas Geografi dan Integrasi dalam Pembangunan Ekonomi*. 53(9).
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Ross, M. L. (2011). Akankah minyak menenggelamkan Musim Semi Arab: Demokrasi dan kutukan sumber daya. *Foreign Aff*, 90, 2.
- Ross, M. L. (2012). Kutukan Minyak. Bagaimana Kekayaan Minyak Bumi Membentuk Perkembangan Bangsa-Bangsa. In *Bagaimana Kekayaan Minyak Bumi Membentuk ...* Princeton University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctt7s3wz>
- Rostow, W. W. (1960). Teori pembangunan model lima tahap pembangunan Rostow dan relevansinya dalam Globalisasi. *Sekolah Ilmu Sosial, Newcastle*.
- Sachs, J. (2005). *Akhir dari kemiskinan: Kemungkinan ekonomi untuk zaman kita*. Penguin
- Shepsle, Kenneth A. (1997). *Menganalisis politik*. New York: Norton.
- Svensson, J. (2003). Mengapa bantuan bersyarat tidak berhasil dan apa yang dapat dilakukan untuk mengatasinya? *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 70(2), 381-402.
[https://doi.org/10.1016/S0304-3878\(02\)00102-5](https://doi.org/10.1016/S0304-3878(02)00102-5)